

MODEL KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU GURU SMP ISLAM TERPADU DI KOTA PEMATANG SIANTAR (STUDI KASUS SMP IT CENDEKIA PEMATANG SIANTAR)

Bismar Sibuea¹⁾, Suriyadi²⁾, Syafaruddin Siahaan³⁾, Makmur Syukri⁴⁾

1) Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN SU, Indonesia

2) Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN SU, Indonesia

3) Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN SU, Indonesia

4) Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN SU, Indonesia

elbizmarsibuea@gmail.com

RINGKASAN - Sekolah - sekolah yang sejatinya sudah memiliki peraturan - peraturan yang baku disetiap sekolahnya, tetap memerlukan kebijakan - kebijakan dari pemimpin maupun guru -guru untuk tetap bisa berkembang dan mengembangkan mutu dari sekolah tersebut. Dan untuk mengembangkan sekolah tentunya diperlukan juga perkembangan mutu dari guru - guru disekolah tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan - kebijakan yang dahulunya semua berasal dari sentral atau pusat, kini telah berubah menjadi desentralisasi atau system demokrasi dalam lembaga pendidikan .Kepala sekolah sebagai pemimpin merupakan kunci utama dari keberhasilan suatu sekolah. Sejatinya pemimpin disetiap lembaga yang menjadi pemeran utama dalam keberhasilan lembaga tersebut. Karna keberhasilan lembaga tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebijakan - kebijakan maupun keputusan - keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Dari beberapa kasus diatas hasil observasi menunjukkan bahwa Kepala Sekolah SMP IT Cendekia Pematang Siantar mengaplikasikan beberapa model.

Kata Kunci: Model, Peningkatan mutu, Sekolah.

PENDAHULUAN

Zaman yang berkembang pesat, tentunya secara tidak langsung memaksa setiap lapisan masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangannya. Perubahan yang disebabkan perkembangan zaman memberikan efek cukup signifikan terhadap perubahan. Pendidikan yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara tentunya menjadi objek yang paling besar yang mendapatkan perhatian khusus. Dan semua oknum yang terlibat suka tidak suka harus mengikuti arus perkembangan tersebut.

Untuk mengikuti perkembangan - perkembangan yang datangnya kadang *unprediction*, maka seorang pemimpin dalam satu lembaga, termasuk lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan inovasi - inovasi, ide-ide baru, dan kebijakan kebijakan baru. Sekolah-sekolah yang sejatinya sudah memiliki peraturan - peraturan yang baku disetiap sekolahnya, tetap memerlukan kebijakan - kebijakan dari pemimpin maupun guru-guru untuk tetap bisa berkembang dan mengembangkan mutu dari sekolah tersebut. Dan untuk mengembangkan sekolah tentunya diperlukan juga perkembangan mutu dari guru-guru disekolah tersebut.

Di sisi lain, pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya diharapkan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3). Dari paragraf diatas bisa diartikan bahwa kebijakan - kebijakan yang dahulunya semua berasal dari sentral atau pusat, kini telah berubah menjadi desentralisasi atau system demokrasi dalam lembaga pendidikan .

Kepala sekolah sebagai pemimpin merupakan kunci utama dari keberhasilan suatu sekolah. Sejatinya pemimpin disetiap lembaga yang menjadi pemeran utama dalam keberhasilan lembaga tersebut. Karna keberhasilan lembaga tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpinnya.

Setelah kepala sekolah sebagai pemimpin, Guru-guru merupakan agent yang paling vital disekolah yang wajib dikembangkan SDM nya, mutu guru akan sangat menentukan kualitas murid sebagai output suatu sekolah. Maka kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu guru sangat penting untuk mencapai target sekolah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengulas tentang Model Kebijakan Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMP Islam Terpadu se Kota pematangsiantar. Makalah ini tentunya diharapkan dapat

mengulas secara lugas bagaimana model model kebijakan kepala sekolah yang ada di SMP IT Kota pematangsiantar.

KAJIAN TEORI

Model adalah pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Departemen P & K, 1984 : 75). Ackoff, et all (1962) mengatakan bahwa model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu sebagai kata benda, kata sifat dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran, sebagai kata sifat model adalah ideal, contoh, teladan dan sebagai kata kerja model adalah memperagakan, mempertunjukkan.

Secara general, kata Model dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya, seperti “*globe*” yang merupakan model dari bumi tempat kita hidup.

Model juga dapat diartikan sebagai representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari suatu kondisi. Menurut Achmad 2008 :1, Model dapat berupa tiruan dari suatu benda, system, atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

Kata model berasal dari bahasa latin “*mold*” yang berarti cetakan atau *Pattern* (pola) dalam artian bisa disimpulkan bahwa model merupakan skema.

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Agar dapat mengetahui dan memahami makna dari kebijakan kepala sekolah, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang artinya kota. Setiap ahli memiliki pengertian kebijakan yang berbeda-beda namun memiliki satu titik kesamaan yakni seperangkat tujuan atau sasaran untuk dicapai, peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Seperti, menurut Indrafachrudi sebagai penulis buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan adalah wisdom, sedangkan kebijaksanaan adalah *policy*. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan

aturan yang ada, kemudian dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Sedangkan kebijaksanaan (*policy*) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan maksud yang diikat oleh kebijaksanaan tersebut .

Klein dan Murphy mengartikan kebijakan sebagai seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi, dengan demikian kebijakan tersebut mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Gamage dan Pang, bahwa kebijakan terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dapat dilaksanakan bersama, dicapai, dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. Kemudian kata kepala sekolah terdiri dari “kepala” dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Kata “kepala” atau pemimpin tersebut didefinisikan seseorang yang memiliki suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan menggerakkan atau mengelola orang lain agar mereka bersedia untuk berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan “sekolah” adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran.

Model Kebijakan Kepala Sekolah Model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat di ambil atas beberapa pertimbangan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari pertimbangan tujuan, strategimaupun keperluan lingkungan.

Adapun model mdel kebijakan kebijakan yaitu.

1. Model Deskriptif. Model pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan) untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat (Ace Suryadi) . Menurut Cohn dalam Sagala model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu “State of the art” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu

- diketahui para pemakai (Syaiful Sagala). Menerangkan kebenaran tentang suatu gejala bukanlah merupakan hal.
2. Model normatif Diantara beberapa jenis model normatif yang di gunakan analisis kebijakan dalam model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan dapat menyelesaikan masalah masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
 3. Model verbal Adalah kebijakan yang diekspresikan dalam bahasa sehari hari disini kepala sekolah membuat kebijakan adalah dengan menggunakan bahasa sehari hari yaitu dengan menggunakan ekspresi atau gaya kepemimpinan yang telah di buat tersebut.
 4. Model sebagai Pengganti dan Perspektif. Pendekatan model perspektif merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan. Model bentuk perspektif juga biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif.

Peningkatan Mutu adalah upaya perbaikan terus menerus mengenai pendidikan dari kurikulum, pendidik, sarana-prasarana, manajemen, Humas dan Akreditasi sekolah agar sekolah tersebut memiliki nilai ideal bagi seseorang yang menjadi customer .Di antara elemen paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Sebab, gurulah aktor utama dalam melakukan tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai-nilai di dalam lingkungan pendidikan. Guru memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat rumit menyangkut berbagai aspek yang melekat pada manusia. Tidak hanya intelektual, tetapi sesungguhnya mental, emosional, dan dalam negara yang menunjung tinggi nilai-nilai agama, tentu saja juga spiritual. Karena itu, guru

haruslah SDM berkualitas terbaik dibandingkan SDM yang mengelola aspek-aspek kehidupan yang lain.

Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, Guru merupakan pemegang peranan yang signifikan. Guru merupakan jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, program inovasi pendidikan secanggih apa pun tetap tidak akan berarti apa-apa. Sebagai apa pun dan semodern apa pun kurikulum pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, yang memiliki kompetensi dan profesional, tidak akan membuahkan hasil maksimal.

Guru Menurut pandangan tradisional, “guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan” (Choirul Yusuf). Ini berarti guru didefinisikan berdasarkan pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan (mengajar), walaupun, “menurut persatuan guru-guru di Amerika Serikat guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas kependidikannya”(Nurdin Syafarudin). Walaupun demikian, definisi pertama jauh lebih dominan. Sehingga dapat dikatakan guru adalah mereka yang selalu mengajar. Namun apakah berarti semua yang belajar berarti guru?

Karena ternyata proses pengajaran ini banyak juga dilakukan oleh masyarakat luas dengan berbagai alasan kepentingan. Karena secara sederhana mengajar dapat didefinisikan sebagai “proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan kepada anak didik”(Redja Mudyahardjo) Artinya, pendidikan yang baik dan berkualitas tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru.

Beberapa upaya yang sedang dilaksanakan dan harus dijalankan dalam rangka meningkatkan mutu guru adalah sebagai berikut:

a. Sertifikasi Guru

Program ini sebenarnya diawali dari sebuah analisis, bahwa guru yang profesional dan berkualitas akan terwujud apabila kesejahteraannya mencukupi. Sebaliknya jangan harap seorang guru akan profesional, jika kesejahteraannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian, ternyata hipotesa itu terjawab. Seperti :

- 1) Dari data statistik menyebutkan bahwa para guru penerima tunjangan profesi yang cukup besar, ternyata belum menunjukkan kemajuan kualitas dalam proses mengajarnya.

2) Mereka tidak berubah, dan mengajarnya biasa-biasa saja, meskipun mereka sudah menerima tunjangan profesi sebagaimana yang diharapkan pemerintah untuk menjadi guru yang professional dengan berbagai kriteria yang sudah ditentukan dalam proses sertifikasi guru.

Jadi menurut analisis penulis dengan membuat hipotesis : yaitu “ Besarnya Penghasilan Guru bukan satu-satunya penentu dan penyebab berkembangnya kualitas guru dalam bekerja”.

b. Peningkatan Kompetensi

Disamping upaya tersebut di atas, peningkatan mutu guru yang mutlak harus dilakukan adalah peningkatan kualifikasi pendidikan, minimal memenuhi amanat UU Guru & Dosen, juga guru harus secara intens harus mengikuti Penataran, Sosialisasi, Seminar, , Workshop dan kegiatan lain yang sejenis, yang dapat dilakukan dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah selaku otoritas maupun Lembaga Pendidikan lainnya yang berkompeten dan profesional.

c. Lembaga Pencetak Guru

Perguruan Tinggi yang memproduksi CALON GURU masa depan sebagai penerus dimasa datang hendaknya harus lebih selektif, transparan, akuntabel, kapabel dan profesional, baik dalam rekrutment calon mahasiswa maupun dosen, proses penyelenggaraan, kurikulum, hingga pembiayaan.

d. Cetak Biru

Kebijakan Pemerintah dalam menangani Pendidikan di Indonesia dimasa yang akan datang, Penulis mempertanyakan Cetak Biru dari pihak Otoritas. Sebab hal tersebut akan menentukan masa depan bangsa, dengan Bonus Demografi yang rata-rata berusia produktif, untk menyongsong tahun 2045, yng merupakan usia emas kita “INDONESIA”.

e. Konsekuensi dan Konsistensi

Konsekuensi dan Konsistensi terhadap Cetak Biru pihak Otoritas di dalam mengambildan menjalankan kebijakan “ Patut kita tunggu “

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi yang dilakukan Penulis di sekolah SMP IT Pematangsiantar mendapatkan beberapa model kebijakan yang dilakukan kepala

sekolah di SMP IT. SMP IT Cendikia Pematngsiantar baru berdiri 2 tahun, dipimpin oleh Ustadz Tigor, dengan jumlah Guru sebanyak 11 orang, siswa sebanyak 33 untuk kelas 7.dan 35 untuk kelas 8. Gedung sekolah berdiri di Jalan Silimakuta, Kelurahan Timbang Galung. Kota Pematangsiantar.

Kepala sekolah SMP IT Cendikia Pematangsiantar melakukan beberapa model kebijakan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan Mutu Guru di SMP IT Cendikia Pematangsiantar, antara lain :

1. Menaikkan Gaji.

Kepala Sekolah SMP IT Cendikia Pematangsiantar dalam kepemimpinannya yang belum genap berusia 2 tahun sudah berani mengusulkan kenaikan gaji para guru kepada yayasan, walau hanya sebesar 5 persen dari gaji seblumnya. Kepala sekolah meyakini bahwa gaji merupakan salah satu factor penting dalam peningkatan mutu guru. Dengan gaji yang layak, maka guru dimungkinkan untuk diminta untuk meningkatkan mutu maupun profesionalismenya.

2. Pembekalan Taskif.

Kepala sekolah mengadakan pembekaaas taskif sekali dalam dua bulan dengan mendatangkan pembicara Guru – guru senior yang sudah dianggap punya integritas dan kredibilitas yang mumpuni.

3. Melaksanakan Study Banding.

Kepala Sekolah SMP IT Cendikia Pematangsiantar mengadakan Studi banding pertahunnya ke sekolah yang dianggap sudah lebih baik mutu dan kualitas gurunya, pada Tahun pertama Kepala sekolah membawa guru – guru untuk study banding dengan sekolah SMP Ali bin Abi Thalib Medan. Kegiatan ini dimaksud sebagai upaya evaluasi dan motivasi bagi para guru – guru SMP IT Cendikian untuk meningkatkan Mutu masing – masing.

4. Membuat Kelompok Mentoring Guru.

Kepala sekolah membentuk kelompok mentoring guru yang tujuannya untuk mementoring guru – guru baru agar bisa di mentoring guru yang lebih senior atau lebih berpengalaman.

5. Perekrutan Guru laki-laki.

Tanpa bermaksud Rasial atau mendiskriminasi guru yang bergender perempuan, kepala sekolah SMP IT Cendikia Pematangsiantar meyakini bahwa Guru Laki – laki dianggap lebih cocok menjadi Guru di tingkat pendidikan SMP yang siswanya secara general sedang mengalami masa pubertas. Sehingga dibutuhkan Guru laki laki yang dianggap memiliki ketegasan yang lebih jika dibandingkan dengan guru perempuan.

SIMPULAN

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Kepala sekolah SMP IT Cendikia Pematangsiantar mengaplikasikan beberapa model, yaitu

1. Model normatif dengan menganalisa kebutuhan sekolah dengan berupaya merekrut guru laki-laki yang dianggap lebih tegas., mengaakan mentoring keguru- guru, mengadakan study banding, menaikkan gaji.
2. Model verbal dengan mengadakan pengawasan sehari –hari kepada guru – guru yang sedang mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suryadi , H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Jakarta: 1994),
- Sagala, Syaiful, 2009 *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung, Alfabeta,
- Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. (Bandung, Pustaka Setia. 2015
- <https://www.kompasiana.com/firmanagungnugroho/55203053a333119941b65fca/peningkatan-mutu-guru-dalam-upaya-peningkatan-mutu-pendidikan>
- Yusuf,Choirul. *Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008),
- Nurdin, SYafaruddin. 2005. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta: Quantum Teaching,),
- Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pedidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),